MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2026



Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-23529000
Fax. 021-3520177

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama **: Heru Setiawan**

Jabatan **: Sekretaris Jenderal**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 2 Januari 2026

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Digital Signature
mk377789804260211084737

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03
		2. Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,79
2.	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya	1. Indeks Kepercayaan Masyarakat tehadap Mahkamah Konstitusi	Skor 82
		2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	78,75 (BB)
		3. Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	3,42
		4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		5. Nilai Reformasi Birokrasi	90,01
		6. Indeks Survei Penilaian Integritas	78,57

Program		Anggaran
Penanganan Perkara Konstitusi	Rp	207.550.598.000
Dukungan Manajemen	Rp	171.784.944.000
Jumlah	**Rp**	**379.335.542.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Digital Signature
mk-152583187026021202355 6

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*			*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*
1	Meningkatnya kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																
	a	Indeks Kualitas Putusan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,03	MK mengukur Indeks Kualitas Putusan dari sisi praktis yaitu dari: 1) Indeks Kepuasan Pelayanan Penanganan Perkara Konstitusi; 2) Indeks Kepuasan Sistem Informasi Penanganan Perkara; 3) Rata-rata waktu penyelesaian perkara; 4) % Penyelesaian Jumlah Perkara yang diputus. 5) Tingkat Implementasi Pelaksanaan Putusan 6) (Menjaga Pancasila dan Nilai-nilai Konstitusi, Berdasarkan Hukum dan Prosedur yang berlaku, Memiliki dasar pertimbangan yang kuat, Mudah Dipahami, Dapat dilaksanakan (eksekutabel)												Skor 91,03	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	b	Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,79	Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, dengan responden dari masyarakat yang pernah mendapatkan pengetahuan, pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pemahaman masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.												Skor 91,79	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Meningkatnya kualitas layanan peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern, dan tepercaya																
	a	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi	Skor 82	Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK diperoleh dari hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh MK. Untuk mengukur sejauhmana kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK maka dilaksanakan survei Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan MK. Sistem peradilan tersebut terkait dengan: 1) Layanan Penanganan Perkara 2) Layanan Sistem Informasi Penanganan Perkara 3) Layanan Aksesibilitas 4) Layanan pengelolaan perpustakaan 5) Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi 6) Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi										Skor 82			Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi	78,75 (BB)	Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] + [Capaian Kinerja].												78,75 (BB)	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	c	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mahkamah Konstitusi	Nilai 3,42	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian. Penilaian ini dilakukan untuk meningkatkan skor SPIP, MRI, dan IEPK												Nilai 3,42	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	d	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Kecukupan Pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas SPI.					WTP								Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
	e	Nilai Reformasi Birokrasi	90,01	Nilai Reformasi Biroktasi diperoleh dari Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Komponen Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan pada aspek-aspek yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional. Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. Selain itu, Evaluasi RB Tematik juga mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.											90,01	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

No	Sasaran Strategis (Outcome)/ Indikator Kinerja Utama		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	f	Indeks Survei Penilaian Integritas	78,57	Indeks SPI digunakan untuk memetakan dan memantau risiko korupsi, serta untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik. Indeks ini dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)												**Skor 78,57**	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 2 Januari 2026

a.n. Ketua Mahkamah Konstitusi
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Digital Signature
mk188614681226021202392 3

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Heru Setiawan

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik
Digital Signature
mk-68859589260211024926

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,75 (BB)
		2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
		3. Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 84,75
		4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,16
		5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal	1. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Nilai 3,35
		2. Indeks Survei Penilaian Integritas	Skor 78,50
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya	1. Tingkat Pengawasan Kearsipan	Nilai 93,13
		2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai 2,94
		3. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 87,60
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional	1. Indeks Sistem Merit	Dasar
5.		1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 89,16

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	2. Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	85,32%
		3. Indeks Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Nilai 81,38
		4. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	A
		5. Indeks Kualitas Kerjasama Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	Nilai 94,45
		6. Indeks Reformasi Hukum	Nilai 98,11
		7. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Skor 86,03
6.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,79
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	1. Tingkat Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	Nilai 4
		2 Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	Skor 89,47
8.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88,98
		2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) Mahkamah Konstitusi	3,92
		3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,25

Program	Anggaran	
Penanganan Perkara Konstitusi	Rp	207.550.598.000
Dukungan Manajemen	Rp	171.784.944.000
Jumlah	**Rp**	**379.335.542.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Ketua Mahkamah Konstitusi,

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik
Digital Signature
mk-262650697260212025310

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)					(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Tepercaya															
	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	78,75 (BB)	Indikator ini merupakan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB												78,75 (BB)	Biro Perencanaan dan Keuangan
	b. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	Capaian kinerja berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK. Kriteria yang digunakan BPK dalam mengeluarkan opini adalah : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah; 2. Kecukupan Pengungkapan;					WTP								Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas SPI.													
	c.	Indeks Layanan Administrasi Umum	Skor 84,75	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada unit kerja. Rumus Jumlah Keseluruhan Skor Survey Internal Jumlah Survey Internal yang dilaksanakan Survey Internal tersebut terkait dengan: 1. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan 2. Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas RB 3. Tingkat Kepuasan Layanan SDM 4. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN, dan Non ASN 5. Tingkat Layanan Huku								**Skor 84,75**					Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				6. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi 7. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi 8. Tingkat Layanan Kehumasan 9. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan 10. Tingkat Layanan Biro Umum 11. Tingkat Layanan rekomendasi kebijakan strategis 12. Tingkat Layanan Sistem Informasi 13. Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 14. Tingkat Layanan Pengawasan Intern													
	d.	Nilai IKPA	Nilai 95,16	IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. IKPA merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja. IKPA	**Nilai 95,16**												Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN)													
	e.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik	• Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) adalah ukuran kualitas perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Kementerian, dan Lembaga. • IPPN dilakukan untuk mengukur keselarasan perencanaan dengan tujuan pembangunan nasional. • IPPN dinilai setiap tahun oleh Kementerian PPN/Bappenas											**Sangat Baik**		Biro Perencanaan dan Keuangan
2.	Meningkatnya kualitas Pengawasan Internal																

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	a.	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	Nilai 3,35	• Penilaian maturitas SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang kemampuan SPIP dalam meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara • Penilaian tingkat maturitas SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)										**Nilai 3,35**			Inspektorat
	b.	Indeks Survei Penilaian Integritas	Skor 78,50	• Indeks SPI digunakan untuk memetakan dan memantau risiko korupsi, serta untuk meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik. • Indeks ini dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan oleh												**Skor 78,50**	Inspektorat

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)													
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya																
	a	Tingkat Pengawasan Kearsipan	Nilai 93,13	• Indeks ini merupakan hasil penilaian dari ANRI • Penilaian tingkat pengawasan kearsipan oleh Arsip pada aspek-aspek tertentu, seperti kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, dan sumber daya kearsipan												**Nilai 93,13**	Biro Umum
	b	Indeks Kualitas Pengelolaan Aset	Nilai 2,94	• Indeks ini merupakan hasil penilaian dari DJKN • Indikator kinerja pengelolaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN). IPA												**Nilai 2,94**	Biro Umum

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				digunakan sebagai alat ukur kualitas pengelolaan BMN.													
	c	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Nilai 87,60	• Indeks ini merupakan hasil penilaian dari DJKN • ITKP digunakan untuk menilai kualitas dan integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah												**Nilai 87,60**	Biro Umum
4.	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan SDM MK yang Profesional																
	a	Indeks Sistem Merit	Dasar	• Indeks Sistem Merit adalah ukuran standar penilaian penerapan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa diskriminasi.												**Dasar**	Biro SDM dan Organisasi

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Indeks ini ditetapkan oleh Kementerian PANRB													
5.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi																
	a	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi	Skor 89,16	• Pengkuran Indikator ini melalui survey • Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan										Skor 89,16			Biro Hukum dan Adminitasri Kepaniteraan
	b	Persentase Perkara Konstitusi yang diputus	85,32%	**Rumus :** Jumlah Perkara Konstitusi yang diputus / Jumlah Perkara yang diregistrasi ditambah dengan sisa perkara tahun sebelumnya) x 100%												**85,32 %**	Biro Hukum dan Adminitasri Kepaniteraan

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	c	Indeks Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	Nilai 81,38	Indikator ini untuk mengukur sejauhmana pelaksanaan/implementasi putusan MK melalui kegiatan • Penyusunan Anotasi Undang-Undang berdasarkan Putusan MK • Penyusunan Kompilasi Putusan MK Tematik • Monitoring dan Evaluasi Putusan MK												**Nilai 81,38**	Biro Hukum dan Adminitasri Kepaniteraan
	d	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai A	• Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan public • Indikator ini merupakan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh												**Nilai A**	Biro Humas dan Protokol

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Kementerian PAN dan RB													
	e	Indeks Kualitas Kerjasama Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	Nilai 94,45	Target tercapai jika hasil 94,45 survei Tingkat Kualitas Kelembagaan MK												**Nilai 94,45**	Biro Humas dan Protokol
	e	Indeks Reformasi Hukum	Nilai 98,11	• Indikator yang digunakan untuk menilai kemajuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip hukum. IRH juga digunakan untuk mengevaluasi regulasi yang sudah berjalan • Indikator ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM												**Nilai 98,11**	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
	f	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Skor 86,03	Indikator ini merupakan hasil survey eksternal untuk mengukur kemudahan dalam berperkara di MK dan mengakses										**Skor 86,03**			1. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan 2. Biro Umum

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				layanan peradilan di MK													
6.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																1. Pusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Biro Humas dan Protokol
	a	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Skor 91,79	Indikator ini untuk Mengukur tingkat pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan survei eksternal										**Skor 91,79**			1. Pusdik Pancasila dan Konstitusi 2. Biro Humas dan Protokol
7.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan dan Literasi Konstitusi																
	a	Tingkat Kualitas Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap	Nilai 4	Indikator kinerja ini diukur dengan melihat Kualitas Rekomendasi Kebijakan penilaian apakah mencakup dimensi seperti revansi, kejelasan, dasdar ilmiah,												**Nilai** 4	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Penguatan Kelembagaan		kelayakan dan inovasi. Penilaian Iku ini akan melibatkan Hakim Konstitusi, Ahli/Pakar													
	b	Tingkat Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	Skor 89,47	Indikator ini merupakan hasil survei internal/eksternal atas layanan perpustakaan dan literasi konstitusi										**Skor 89,47**			Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Perpustakaan
8	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara																
	a	Indeks Kepuasan Pelayanan Sistem Informasi	Skor 88,98	Indikator ini merupakan hasil survei eksternal atas pelayanan system informasi di Mahkamah Konstitusi										**Skor 88,98**			Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi
	b	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	Nilai 3,92	• Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menggambarkan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE												**3,92**	Pusat Teknologi, Informasi dan

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				di instansi pemerintah. • Indeks ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)													
	c	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai 2,25	• Indikator ini merupakan hasil penilaian BPS • IPS ini merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sectoral dan satu data Indonesia (SDI)												**2,25**	Pusat Teknologi, Informasi dan

Jakarta, 2 Januari 2025
Sekretaris Jenderal
Heru Setiawan

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiryanto
Jabatan : Plt. Panitera

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Wiryanto

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk-113458520926012809381 7

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA
KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Program (Outcome)	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Permohonan Konstitusi	Skor 89,16
		2. Persentase Permohonan Konstitusi yang diputus	72%
		3. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Permohonan (Permohonan PHPU, PPP, dan *Impeachment*)	100%
		4. Persentase Penyusunan Konsep Putusan dan/atau Ketetapan Permohonan Konstitusi yang tepat waktu (PUU dan SKLN)	92%
		5. Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan	100%
		6. Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	100%
		7. Persentase Penyiapan Bahan Substansi Pembahasan Penanganan Permohonan Tepat Waktu	90%
		8. Persentase Dukungan Terhadap Hakim Drafter dalam Penyelesaian Konsep Putusan dan Ketetapan Tepat Waktu	90%
		9. Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 87

Jakarta, 2 Januari 2026

Ketua Mahkamah Konstitusi,

Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi,

Wiryanto

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk208567386926021408164 5

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*			*(6)*			*(7)*					*(8)*	*(9)*
1.	Meningkatnya Kualitas Putusan dan Penanganan Perkara Konstitusi															
	a Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Permohonan Konstitusi	Skor 89,16	• Pengukuran Indikator ini melalui survey • Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan									Skor 89,16				Kepaniteraan
	b Persentase Permohonan Konstitusi yang diputus	72%	**Rumus :** Jumlah Permohonan Konstitusi yang diputus / Jumlah Permohonan yang diregistrasi ditambah dengan sisa permohonan tahun												72%	Kepaniteraan

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			sebelumnya) x 100%													
	c Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Permohonan (Permohonan PHPU, PPP, dan *Impeachment*)	100%	**Rumus :** Jumlah permohonan yang selesai tepat waktu/Jumlah Total Permohonan yang selesai pada tahun 2026	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	Kepaniteraan
	d Persentase Penyusunan Konsep Putusan dan/atau Ketetapan Permohonan Konstitusi yang tepat waktu (PUU dan SKLN)	92%	**Rumus :** Jumlah konsep putusan yang disusun tepat waktu/ Total jumlah konsep putusan yang disusun pada bulan berjalan	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Kepaniteraan
	e Persentase Ketepatan Waktu Upload Putusan	100%	**Rumus :** Jumlah putusan yang diupload tepat waktu/Jumlah Total putusan yang diupload tahun 2026	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	Kepaniteraan
	f Persentase Ketepatan Waktu Minutasi	100%	**Rumus :** Jumlah minutasi permohonan yang tepat waktu/Jumlah minutasi permohonan tahun 2026	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	Kepaniteraan

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP:196406051988031001

Digital Signature
mk195489886126022008050 3

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id

No	Sasaran Program (Outcome)/ Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
				Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	g Persentase Penyiapan Bahan Substansi Pembahasan Penanganan Permohonan Tepat Waktu	90%	**Rumus:** Jumlah bahan substansi yang diserahkan paling lama h-1 dalam RPH/Jumlah permohonan yang dibahas dalam laporan RPH dan permohonan yang telah selesai pemeriksaan dalam pleno	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	h Persentase Dukungan Terhadap Hakim Drafter dalam Penyelesaian Konsep Putusan dan Ketetapan Tepat Waktu	90%	**Rumus:** Jumlah konsep putusan yang diterima Hakim Drafter/Jumlah konsep putusan yang didukung tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
	i Indeks Layanan Kepaniteraan	Skor 87	Indikator ini merupakan hasil survei atas pelayanan internal pada Kepaniteraan											Skor 87		Kepaniteraan

Jakarta, 2 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Heru Setiawan

Pihak Pertama,

Tatang Garjito

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1.	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	Nilai 87,13
		2.	Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	Nilai 89,88
		3.	Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai 23,45
		4.	Tingkat Pelaporan Kinerja	Nilai 12,60
		5.	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 85,20
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1.	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	97,62
		2.	Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output	100
		3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,95%
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	92,69

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	Nilai 5
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,96%
		8.	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Penyelenggaraan Perencanaan, Evaluasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	120.342.481.000
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	1.034.281.000
Jumlah	**Rp**	**121.376.762.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Tatang Garjito

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk-370436701260129053516

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*		*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
1.	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja**																	
	a Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	**87,13**															87,13	
			Indikator Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan salah satu aspek dari penilaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendahraan Kementerian Keuangan. Target Tercapai apabila Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	**Penyusunan Dokumen Perencanaan**		**6 Dok**	**3 Dok**	**1 Dok**	**4 Dok**	**1 Dok**	**2 Dok**	**6 Dok**	**3 Dok**	**3 Dok**	**4 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
				1	Revisi POK TA 2026	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2	Revisi DIPA melalui DJA/Kanwil TA 2026	1 Dok			1 Dok			1 Dok			1 Dok			
				3	Revisi Halaman III DIPA TA 2026		1 Dok		1 Dok			1 Dok			1 Dok			
				4	Perubahan Renja MK TA 2026							1 Dok						

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Perbendaharaan mencapai 87,13	5	Laporan Hibah	1 Dok						1 Dok			1 Dok			
				6	PNBP TA 2027 (Proposal PNBP, BA Penelaahan)	1 Dok												
				7	Usulan Pagu Indikatif MK TA 2027	1 Dok												
				8	Usulan Prioritas Nasional MK TA 2027		1 Dok											
				9	Reviu Angka Dasar TA 2027 (pemutakhiran angka dasar TA 2027 dan menyusun prakiraan maju TA 2028-2030)	1 Dok												
				10	Renja K/L pada Pagu Indikatif TA 2027				1 Dok									
				11	RKAKL pada Pagu Anggaran TA 2027 (RKAKL, BA, TOR RAB)							1 Dok						

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				12	Bahan Nota Keuangan TA 2027								1 Dok					
				13	RKAKL pada Pagu Alokasi Anggaran TA 2027 (RKAKL, BA, TOR RAB)									1 Dok				
				14	RDP Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Laporan Keuangan 2025						1 Dok		1 Dok	1 Dok				
	b Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	**89,88**	Indikator Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran merupakan salah satu aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Nilai indikator ini														89,88	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
				Penyusunan Dokumen Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran		**4 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**2 Dok**	**3 Dok**	
				1	Revisi Pemutakhiran Data DIPA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			dikeluarkan oleh Bappenas. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini mencapai 89,88	2	Sinkronisasi Renja-RKA K/L TA 2026	1 Dok											1 Dok	
				3	Rencana Umum Pengadaan (RUP) TA 2026	1 Dok												
				4	Revisi RUP TA 2026	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				5	Laporan Revisi POK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	c Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	**Nilai 23,45**	Indikator Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini mencapai Nilai 24,42														Nilai 24,42	Bagian Perencanaan dan Evaluasi
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja			**3 dok**	**2 Dok**			**2 Dok**	**1 Dok**						
				1	Renstra MK 2025-2029							1 Dok						Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
				2	Cascading Kinerja MK 2025-2029						1 Dok							
				3	Pohon Kinerja MK 2025-2029						1 Dok							
				4	SK Sekjen tentang Indikator Kinerja			1 Dok										
				5	Definisi Operasional Indikator Kinerja			1 Dok										

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				6	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)		1 Dok											
				7	Perjanjian Kinerja (PK)		1 Dok											
				8	Penjelasan dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja		1 Dok											
				Pengkuruan Capaian Kinerja		**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	**1 Dok**	
				1	Laporan Capaian Pengukuran Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
	d Tingkat Pelaporan Kinerja	**Nilai 12,60**	Indikator Tingkat Pelaporan Kinerja merupakan salah satu komponen dalam penilaian evaluasi akuntabilitas														**12,96**	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
				Menyusun Dokumen Pelaporan Kinerja		**11 dok**	**5 dok**	**2 dok**	**4 dok**	**2 dok**	**2 dok**	**4 dok**	**2 dok**	**3 dok**	**4 dok**	**3 dok**	**4 dok**	
				1	Dokumen LAKIP	9 dok	3 dok											

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini mencapai Nilai 12,96	2	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran (Monitoring Rencana Aksi dan Penyerapan Anggaran)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				3	Laporan Monev Prioritas Nasional (Bappenas)				1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 Dok	
				4	Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 Dok	
				5	Survei Layanan Administrasi Umum											1 Dok		
				6	Survei Layanan Administrasi Eksternal									1 Dok				
				7	Laporan Monitoring Capaian Anggaran MK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	e Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	**Skor 85,2**	**Indikator ini merupakan Hasil dari Survey Internal Mahkamah Konstitusi**													**85,2**		Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja)
				Melaksanakan Layanan Perencanaan dan Keuangan		3 dok	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	**3 dok**	
				1	Laporan Monitoring Revisi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Sub Bagian Program dan Anggaran)
				2	Laporan Monitoring Revisi RUP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				3	Laporan Monitoring Pembayaran Tagihan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
				4	Laporan LPJ Bendahara Pengeluaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
				5	Laporan LPJ Bendahara Penerimaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
2.	**Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan**																	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	a Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	**97,62**	Indikator Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu aspek dari penilaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendahraan Kementerian Keuangan. Target Tercapai apabila Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran Perbendaharaan mencapai 97,62														**97,62**	Bagian Keuangan Sub Bagian Verifikasi dan Sub Bagian Perbendaharaan
				Melaksanakan Pengelolaan Perbendaharaan dan Verifikasi		**9 dok**	**9 dok**	**9 dok**	**11 dok**	**9 dok**	**9 dok**	**11dok**	**9 dok**	**9 dok**	**11 dok**	**9 dok**	**11 dok**	
				1	Laporan Monitoring Belanja Kontraktual	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2	Laporan Penerbitan SPM	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				3	Laporan Berita Acara SPD Rampung				1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 Dok	
				4	Laporan Penyelesaian Tagihan LS dan GU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				5	Laporan Penyelesaian Tagihan/Pembayaran Kuitansi SPBy	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				6	Laporan Pengelolaan UP dan TUP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				7	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan KKP				1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 Dok	
				8	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				9	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				10	Laporan PNBP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				11	Laporan Pajak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				12	Laporan LPJ Bendahara Pengeluaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
				13	Laporan LPJ Bendahara Penerimaan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bagian Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
	b Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output	**100**	Indikator Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output merupakan salah satu aspek dari														100	Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			penilaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendahraan Kementerian Keuangan. Target Tercapai apabila Nilai Indikator ini mencapai nilai 100	Melakukan Monitoring Capaian Output		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Laporan Keuangan)
				1	Laporan Capaian Output yang Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	c **Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi**	**WTP**	Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa (dalam hal ini BPK RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi. Capaian kinerja. Target Tercapai apabila Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi							**WTP**								Bagian Keuangan (Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan)
				Pelaksanaan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan		4 dok	4 dok	3 dok	4 dok	3 dok	4 dok	4 dok	3 dok	3 dok	4 dok	3 dok	3 dok	
				1	Laporan Keuangan Semester I							1 dok						
				2	Laporan Keuangan Triwulan III										1 dok			
				3	Laporan Keuangan unaudited		1 dok											
				4	Laporan Keuangan audited				1 dok									

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			mendapatkan opini WTP	5	Laporan Monitoring Ketidaksesuaian Akun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				6	Hasil Rekonsiliasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				7	Laporan Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				8	Laporan Pengendalian Internal atas Pelaporan keuangan	1 Dok					1 Dok			1 Dok				
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan																	
	a Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	**99,95**	• Tingkat penggunaan produk dalam negeri (PDN) diukur dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah nilai dari penggunaan barang atau jasa yang berasal														**99,95**	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			dari dalam negeri. • Nilai TKDN dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan hasil monitoring masing-masing PPK/unit kerja setiap bulan pada aplikasi SAKTI														
				Melakukan penerapan penggunaan produk dalam negeri serta Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				1 Laporan Penggunaan Produl Dalam Negeri	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	b Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	**100%**	• Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public • Nilai implementasi Core Value ASN berAkhlak dikeluarkan oleh Biro SDMO berdasarkan laporan dari masing-masing eselon 2 setiap bulan terkait dengan implementasi core values ASN Berakhlak di masing-masing unit kerja													**100%**	
				Implementasi/Penerapan Core Value	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)														
				1	Laporan Kegiatan Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	c Nilai Evaluasi SAKIP	**A**	• Evaluasi SAKIP adalah proses penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). • Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja unit kerja • Komponen-komponen yang dinilai dalam evaluasi									**A**						

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			SAKIP meliputi: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja • Nilai Evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh inspektorat															
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				1	Laporan Capaian Kinerja unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2	Laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP								1 Dok					
	D Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	**3**	• Tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level, RML)														3	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			adalah ukuran seberapa baik organisasi mengelola, menilai, dan memantau risiko • Nilai kematangan manajemen risiko unit kerja dikeluarkan oleh inspektroat															
				Penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring			3 dok		1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 dok	
				1	Surat Pernyataan Komitmen		1 Dok											
				2	Profil Risiko		1 Dok											
				3	Prioritas Risiko		1 Dok											
				4	Laporan Monitoring Manajemen Risiko	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	e Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	**92,69**	• Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah hasil dari penilaian									**92, 69**						

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	(Wilayah Bebas Korupsi)		komponen pengungkit dan komponen hasil • Nilai Pembangunan ZI unit kerja di keluarkan oleh TPI/Inspektorat															
				Pelaksanaan PembangunanZI menuju WBK di Biro Perencanaan dan Keuangan		1 Dok	1 Dok		1 Dok		2 Dok	1 Dok			1 Do		1 Dok	
				1	Rencana Aksi ZI		1 Dok											
				2	Dokumen Pembangunan ZI						1 Dok						1 Dok	
				3	Laporan Monitoring Rencana Aksi ZI	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
				4	LKE ZI						1 Dok							
	f Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat	**Nilai 5**	Hasil Penilaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP														**3,25**	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	waktu sesuai SOP		diperoleh melalui aplikasi SIVIKA															
				Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan													Nilai 5	
				1	Laporan Penyelesaian Pertanggujawaban Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	g **Tingkat Penyerapan Anggaran**	**99,96%**	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun														99,96 %	
				Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan		1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
				1	Dokumen Laporan Penyerapan Anggaran	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	h Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja													Nilai 80	
				Deviasi Rencana Penarikan Dana													
				1 Dokumen Laporan Tingkat Deviasi Penarikan Dana	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Tatang Garjito

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Handayani
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Sri Handayani**

PERJANJIAN KINERJA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi	1. Tingkat Penyempurnaan Kualitas Tata Kelola Organisasi Mahkamah Konstitusi	100%
		2. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	4 unit kerja
		3. Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB	83,03
2.	Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM	1. Indeks Sistem Merit	Dasar
		2. Tingkat Kepuasan Layanan SDM	83,43
		3. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN dan Non ASN	86,33
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1. Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri	97,32
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	100%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	92,88
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	5
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	100%
		8. Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	2.803.450.000
2. Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia, Penataan Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Rp	2.753.314.000
Jumlah	**Rp**	**5.556.764.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Sri Handayani

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik
Digital Signature
mk64511967260203083209

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
1.	**Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi**																	
	1.	Tingkat Penyempurnaan Kualitas Tata Kelola Organisasi Mahkamah Konstitusi	100%	Target tercapai 100% apabila 6 Dokumen Tata Kelola Organisasi Mahkamah Konstitusi telah disusun. Rumus : Realisasi Jumlah Dokumen Tata Kelola Organisasi yang telah disusun / target jumlah Dokumen Tata Kelola Organisasi X 100%	1. Dokumen Rperpres SOTK, Rpersekjen SOTK, dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis						1 Dok						1 Dok	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi (Kepala Sub Bagian Ortala)
					2. Dokumen Anjab dan ABK Fungsional dan penyelesaian dokumen Pola Karier						1 Dok						1 Dok	
					3. Dokumen Peta Jabatan						1 Dok						1 Dok	
					4. Dokumen Kelas Jabatan						1 Dok						1 Dok	
					5. Dokumen Formasi JF Pengawas Keuangan Negara (perubahan dari JF Penata Laksana Barang, jenjang keterampilan)						1 Dok						1 Dok	
					6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengisian SOP dalam Aplikasi e-SOP				1 Dok				1 Dok				1 Dok	
	2.	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	4 Unit Kerja	Target tercapai apabila terdapat empat unit kerja yang diusulkan oleh Biro SDMO kepada TPI untuk ditetapkan	1. Sosialisasi kepada unit kerja Pelaksanaan WBBM	1 Dok												Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi
					2. Pembentukkan tim ZI unit kerja	1 Dok												

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				sebagai wilayah Zona Integritas WBK/WBBM Rumus : Realisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM / 100% target Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM X	3. Pelaksanaan pembangunan WBBM		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok					Birokrasi (Kepala Sub Bagian Fasilitasi RB)
					4. Usulan kepada TPI									1 Dok				
					5. Laporan Biro SDMO terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM												1 Dok	
	3.	Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB	83,03	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan Survei Internal dengan target 83,03 Rumus : Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB yang dicapai / 100% target Skor Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB X	Hasil skor Tingkat Kepuasan Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas RB	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi (Kepala Sub Bagian Ortala; Kepala Sub Bagian Fasilitasi RB)
2.	**Meningkatnya Kualitas dan Pengelolaan SDM**																	
	1.	Indeks Sistem Merit	Dasar	Target tercapai apabila nilai Indeks Sistem Merit berada pada kategori "Dasar" Rumus : Realisasi Indeks Sistem Merit yang dicapai / 100% target Indeks Sistem Merit X	1. Penyiapan Dokumen Penilaian Mandiri	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM; Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan PPNPN)
					2. Penilaian Mandiri	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							
					3. Sosialisasi Pelaksanaan Survey Terhadap Kepuasaan dan Keterikatan Pegawai ASN							1 Dok						
					4. Pelaksanaan Survey							1 Dok	1 Dok					
					5. Penyampaian Sanggah									1 Dok	1 Dok	1 Dok		
					6. Penyusunan Laporan Sistem Merit												1 Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
	2. Tingkat Kepuasan Layanan SDM	83,43	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan Survei Internal dengan target 83,43 Rumus : Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM yang dicapai ——————————— X 100% target Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM	Hasil skor Tingkat Kepuasan Layanan sumber daya manusia dan tingkat kepuasan layanan magang	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM; Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan PPNPN)
	3. Tingkat Kepuasan Layanan Kesehatan bagi Hakim, ASN dan Non ASN	86,33	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan Survei Internal dengan target 86,33 Rumus : Realisasi Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM yang dicapai ——————————— X 100% target Skor Tingkat Kepuasan Layanan SDM	Hasil skor Tingkat Kepuasan Layanan Poliklinik MK yang dilakukan oleh Biro Renkeu. Capaian kinerja setiap bulan dengan memperhatikan 10 laporan yang dihasilkan oleh Poliklinik MK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Kepala Bagian SDM (Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian)
3.	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi**																
	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	97,32	Merupakan nilai yang dikeluarkan oleh biro Renkeu setiap bulan berdasarkan hasil input masing-masing PPK/unit kerja dalam aplikasi SAKTI Rumus : Realisasi TKDN ——————— X 100% Target TKDN	Hasil Nilai TKDN atas pengadaan di MK dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Staf PPK

	2.	Tingkat implementasi Core Value Berakhlak	100%	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Biro SDMO atas pelaksanaan implementasi nilai Core Value Berakhlak di masing-masing unit kerja, Komponen penilaian : - Kegiatan Core Value ASN BerAkhlak yang dilaksanakan oleh unit kerja atau Biro SDMO - Implementasi/Penerapan Core Value ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) pada unit kerja eselon II Rumus : Realisasi Nilai implementasi Core value berakhlak / Target Nilai X 100%	Hasil Penilaian implementasi Nilai core Value Berakhlak unit kerja yang dikeluarkan oleh Biro SDMO	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Biro SDMO
	3.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro SDMO	A	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi oleh Inspektorat dengan target A Rumus : Realisasi nilai SAKIP Biro SDMO / Target nilai SAKIP X 100%	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi oleh Inspektorat	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Biro SDMO
	4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Hasil penilaian manajeman resiko di Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi oleh Inspektorat dengan target 3 Rumus : Realisasi nilai manajemen resiko / Target nilai manajemen resiko X 100%	1. Surat Pernyataan Komitmen		1 Dok											Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Biro SDMO
					2. Profil Resiko	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
					3. Prioritas Resiko	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
					4. Laporan Evaluasi Manajemen Resiko				1 Dok			1 Dok			1 Dok		1 Dok	
	5.	Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi)	92,88	Nilai pembangunan ZI menuju WBK Biro SDMO berdasarkan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh TPI (Inspektorat) Rumus : Realisasi Nilai ZI / Target Nilai ZI X 100%	1. Penyusunan Tim Pembangunan ZI menuju WBK Biro SDMO	1 Dok												Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di Biro SDMO
					2. Penyusunan Renaksi		1 Dok											
					3. Pengisian Kertas Kerja			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							
					4. Pengumpulan Evidence			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok							
					5. Penilaian oleh TPI							1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok		

					6. Laporan Pembangunan ZI												1 Dok	
	6.	Penyelesaian PertanggungjawabanKeuangan yang tepat waktu yang sesuai SOP	5	Target tercapai apabila penyelesaian pertanggungjawaban sesuai SOP dan tepat waktu melalui SIVIKA setiap bulannya		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Staf PPK
	7.	Tingkat penyerapan anggaran Biro SDMO	100%	Target tercapai jika % penyerapan anggaran Biro SDMO berdasarkan SIVIKA tercapai 100% Rumus : Realisasi tingkat penyerapan / Target tingkat penyerapan X 100%		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Staf PPK
	8.	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja. Target tercapai jika tingkat deviasi rencana penarikan dana mendapat nilai 80.		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Staf PPK

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,

Sri Handayani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Laksono
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Heru Setiawan

Pihak Pertama,

Fajar Laksono

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk-122932022326020211272 9

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1.	Tingkat Layanan Hukum	81
		2.	Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	83,34
		3.	Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	86,12
		4.	Tingkat Kualitas Reregulasi atau Deregulasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan lainnya	30,05
		5.	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	81
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1.	Tingkat Layanan Risalah Persidangan	91,86
		2.	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	94,86
		3.	Tingkat Layanan Persidangan	95,56
		4.	Tingkat Layanan Putusan	92,02
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	86
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	5
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,99%
		8.	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Rp	183.724.381.000
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	120.000.000
Jumlah	**Rp**	**183.844.381.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Fajar Laksono

PENJELASAN RENCANA AKSI
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi – Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												Penanggung Jawab
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)			
1.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Tingkat Layanan Hukum	Skor 81														Skor 81	Kabag HTUK
				Target tercapai jika kepuasan Layanan Hukum terpenuhi sesuai target	1. Persentase Penyusunan Dokumen Rancangan Produk Hukum Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					2. Persentase Layanan Advokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					3. Persentase Penyelesaian Telaahan dan Jawaban Surat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					4. Persentase Penyusunan Telaah Produk Hukum Berdasarkan Permintaan Unit lain	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					5. Persentase Layanan Konsultasi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					6. Persentase Pengelolaan Laman Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					7 Perentase Layanan Teknis Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2. Tingkat Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	Skor 83.34														Skor 83.34	Kabag HTUK
				Target tercapai jika kepuasan Layanan Administrasi Panitera Konstitusi terpenuhi sesuai target	1. Persentase Layanan Administrasi Panitera Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					2. Persentase Layanan Tata Usaha Biro HAK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3. Tingkat Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	Skor 86.12														Skor 86.12	Kabag HTUK

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output		Rencana Aksi: Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												Penanggung Jawab
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)			(8)			(9)			(10)			
					Target tercapai jika kepuasan Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Layanan Administrasi Asisten Ahli Hakim Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.	Tingkat Kualitas re-regulasi atau deregulasi produk hukum Mahkamah Konstitusi dan peraturan lainnya	Indeks 30,05															Indeks 30.05	Kabag HTUK
					Target tercapai jika re-regulasi atau deregulasi produk hukum Mahkamah Konstitusi dan peraturan lainnya terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						2.	Persentase Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5.	Tingkat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK	Skor 81															Skor 81	Kabag HTUK/ Kabag Fasyantek
					Target tercapai jika Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Putusan MK terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Penyusunan Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag HTUK
						2.	Persentase Data Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Fasyantek
						3.	Persentase Data Kompilasi Putusan Tematik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag Fasyantek
2.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Fasilitas dan Layanan Teknis Persidangan	1.	Tingkat Layanan Risalah Persidangan	Skor 91.96															Skor 91.96	Kabag Fasyantek
					Target tercapai jika kepuasan Layanan Risalah Persidangan terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Tersedianya Data Risalah Sidang Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						2.	Persentase Peningkatan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Risalah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						3.	Presentase Layanan Teknis Risalah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
								Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
								Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)			(8)			(9)			(10)			
		2.	Tingkat Layanan Penerimaan Permohonan	Skor 94.86															Skor 94.86	Kabag Fasyantek
					Target tercapai jika Kepuasan Layanan Permohonan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Layanan Data Penerimaan Permohonan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						2.	Persentase Pengingkatan Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Penerimaan Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						3.	Presentase Layanan Teknis Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		3.	Tingkat Layanan Persidangan	Skor 95.56															Skor 95.56	Kabag Fasyantek
					Target tercapai jika kepuasan Layanan Persidangan terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Ketersediaan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						2.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Persidangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						3.	Presentase Layanan Teknis Persidangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4.	Tingkat Layanan Putusan	Skor 91.10															Skor 91.10	Kabag Fasyantek
					Target tercapai jika kepuasan Layanan Putusan terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Ketersediaan Data Putusan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						2.	Persentase Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						3.	Presentase Layanan Teknis Putusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,88%															99,88%	Kabag Fasyantek
					Target tercapai jika persentase penggunaan Produk Dalam Negeri terpenuhi sesuai target	1.	Persentase Survei Indeks Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%															100%	Kabag HTUK

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)			(9)			(10)			
				Target tercapai jika Implementasi Core Value ASN BerAkhlak terpenuhi sesuai target	1. Persentase Survei Indeks Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kabag HTUK
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai A														Nilai A	Kabag HTUK
				Target tercapai jika Nilai Evaluasi SAKIP terpenuhi sesuai target	1. Nilai Survei Indeks Nilai Evaluasi SAKIP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Indeks 3.01														Indeks 3.01	Kabag HTUK
				Target tercapai jika nilai Kematangan Manajemen Risiko terpenuhi sesuai target	1. Indeks Survei Indeks Kematangan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	Skor 85														Skor 85.10	Kabag Fasyantek
				Target tercapai jika Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) terpenuhi sesuai target	1. Nilai Survei Indeks Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	Skor 5.10														Skor 5.10	Kabag Fasyantek
				Target tercapai jika nilai Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu sesuai SOP terpenuhi sesuai target	1. Skor Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99.99%														99.99%	Kabag Fasyantek

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/ Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*			
				Target tercapai tingkat penyerapan anggaran terpenuhi sesuai target	Persentase Laporan Penyerapan anggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Heru Setiawan

Fajar Laksono

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Fajar Laksono - NIP:197912262008011008

Digital Signature
mk-188135586726021310144 7

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Pan Mohamad Faiz Kusuma W.**

PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK	1. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif
		2. Tingkat Layanan Kehumasan	Nilai 84,11
		3. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai 83,5
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 88,36
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan	1. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai 94,60
		2. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	Nilai 94,31
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	94,88
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	5
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,93%
		8. Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan MK serta Kerjasama Kelembagaan	Rp	7.217.772.000
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	1.275.396.000
Jumlah	**Rp**	**8.493.168.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk128661767726021910423

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
1.	Meningkatnya Akses Informasi Perkara dan Putusan MK																
	a. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Infor-matif	Target tercapai jika hasil Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik mendapat penilaian "Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)	1. Perencanaan Keterbukaan Informasi Publik													Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Kasubag Humas
				2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik melalui seluruh kanal media dan informasi MK, antara lain laman, media sosial, majalah, dan publikasi lainnya													
				3. Penyusunan laporan Keterbukaan Informasi Publik													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				4. Pengisian *Self-Assessment Questionnaire* dan wawancara penilaian oleh Komisi Informasi Pusat							■	■	■	■	■	■	
	b. Tingkat Layanan Kehumasan	Nilai 84,11	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan mendapat nilai 84,11	1. Pelaksanaan layanan kehumasan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Kasubag Humas
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan							■	■					
				3. Melakukan survei tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan									■	■			
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat layanan											■	■	

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				kehumasan dan keprotokolan													
	c. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan	Nilai 83,5	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mendapat nilai 83,5	1. Pelaksanaan layanan tata usaha pimpinan dan Keprotokolan													Kabag Tata Usaha Pimpinan dan Protokol Kasubag Tata Usaha Pimpinan Kasubag Protokol
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat layanan tata usaha pimpinan dan Keprotokolan													
				3. Melakukan survei tingkat layanan tata usaha pimpinan dan Keprotokolan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan													
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
2.	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi																
	a. Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 88,36	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi mendapat nilai 88,36	1. Penyebarluasan informasi mengenai Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi													Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Kasubag Humas
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi													Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri
				3. Melakukan survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila,													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan									■	■			
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi											■	■	
3.	Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Kelembagaan																
	a. Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri	Nilai 94,60	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Kualitas Kerja Sama Dalam Negeri mendapat nilai 94,60	1. Perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan kerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di dalam negeri	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kabag Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Kasubag Kerja Sama Dalam Negeri
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang							■	■					

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				relevan dengan pengukuran tingkat kerja sama dalam negeri							■	■					
				3. Melakukan survei tingkat kerja sama dalam negeri bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan									■	■			
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat kerja sama dalam negeri											■	■	
	b. Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional	Nilai 94,31	Target tercapai jika hasil survei Tingkat Kualitas Kerja Sama Internasional mendapat nilai 94,31	1. Perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kegiatan kerja sama dengan mitra kerja Mahkamah Konstitusi di tingkat internasional	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Kabag Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Kasubag Sekretariat Tetap AACC
				2. Mempersiapkan kuesioner dan responden yang relevan dengan pengukuran							■	■					Kasubag Kerja Sama Luar Negeri

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				tingkat kerja sama internasional													
				3. Melakukan survei tingkat kerja sama internasional bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan													
				4. Menyusun laporan hasil survei tingkat kerja sama internasional													
4.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol																
	a. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	Tingkat penggunaan produk dalam negeri (PDN) diukur dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN adalah nilai dari penggunaan barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri. Nilai TKDN dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan	Melakukan penerapan penggunaan produk dalam negeri serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa serta													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
			Keuangan berdasarkan hasil monitoring masing-masing PPK/unit kerja setiap bulan pada aplikasi SAKTI.	penyusunan laporannya.													
	b. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%	Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK adalah penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai implementasi *Core Value* ASN berAkhlak dikeluarkan oleh Biro SDMO berdasarkan laporan dari masing-masing eselon 2 setiap bulan terkait dengan implementasi *core values* ASN Berakhlak di masing-masing unit kerja	Implementasi/ Penerapan Core Value ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) beserta penyusunan laporannya													
	c. Nilai Evaluasi SAKIP	A	Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan tindak lanjut													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
			akuntabilitas kinerja unit kerja. Komponen-komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIPcmeliputi: Perencan aan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja. Nilai Evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat.	rekomendasi hasil evaluasi SAKIP													
	d. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	Tingkat kematangan manajemen risiko (risk maturity level, RML) adalah ukuran seberapa baik organisasi mengelola, menilai, dan memantau risiko. Nilai kematangan manajemen risiko unit kerja dikeluarkan oleh Inspektorat.	Penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring													
	e. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	94,88	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah hasil dari penilaian komponen	Pelaksanaan Pembangunan dan Penguatan ZI menuju WBK di Biro Humas													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
	(Wilayah Bebas Korupsi)		pengungkit dan komponen hasil. Nilai Pembangunan ZI unit kerja di keluarkan oleh TPI/Inspektorat.	dan Protokol, berupa Rencana Aksi, Dokumen Pembangunan, Laporan Monitoring Rencana Aksi, dan LKE Zona Integritas													
	f. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP	5	Hasil Penilaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIVIKA	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan beserta Laporannya													
	g. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,93%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun	Penyerapan Anggaran Biro Humas dan Protokol beserta penyusunan laporannya													
	h. Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi	Penyerapan Anggaran Biro Humas dan Protokol													

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
			SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja	beserta penyusunan laporannya													

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol,
Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pan Mohamad Faiz Kusuma - NIP:198212242006041005
Digital Signature
mk111353185260219104730

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Wijayanto
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Budi Wijayanto**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KERJA
BIRO UMUM
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah tangga, Arsip Ekspedisi, Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara serta Pengamanan	1.	Tingkat Layanan Biro Umum	85,04
		2.	Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan	29,60
		3.	Tingkat Pengelolaan BMN	1,91
		4.	Tingkat Pengawasan dan Pengendalian BMN	1,28
		5.	Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal	92,62
		6.	Tingkat Pengawasan Arsip Internal	93,89
		7.	Tingkat Digitalisasi Arsip	85,67
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Umum	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,95
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	92,89
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	4
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	100%
		8.	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Penanganan Perkara Konstitusi, Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Rp	308.000.000
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	32.873.766.000
Jumlah	**Rp**	**33.181.766.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Budi Wijayanto

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk116861748126020502 1005

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BIRO UMUM
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Rumah tangga, Arsip Ekspedisi, Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara serta Pengamanan																
	1. Tingkat Layanan Biro Umum	Skor 85,04	Target tercapainya kepuasan layanan Biro Umum minimal 85,04 **Rumus** Survei layanan Biro Umum	Survei layanan kerumahtanggaan, Perlengkapan dan Pengamanan												Skor 85,04	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan
				1 Pelaksanaan Survei kepuasan layanan Biro Umum								Survei					

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
	2. Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan	29,60	Target tercapainya pemenuhan Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan minimal 29,60 **Rumus** Nilai Tingkat Pemanfaatan Sistem Pengadaan dari ITKP oleh LKPP	Survei dan Pengisian Kuesioner Pemanfaatan Sistem Pengadaan												29,60	Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN
	3. Tingkat Pengelolaan BMN	1,91	Target tercapainya pemenuhan Tingkat Pengelolaan BMN minimal 1,91 **Rumus** Nilai Tingkat Tingkat Pengelolaan BMN	Survei dan Pengisian Kuesioner Tingkat Pengelolaan BMN												1,91	Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN
				Pelaksanaan Survei								Survei					
	4. Tingkat Pengawasan dan Pengendalian BMN	1,28	Target tercapainya pemenuhan Pengawasan dan Pengendalian BMN minimal 1,28 **Rumus** Nilai Tingkat Pengawasan dan Pengendalian BMN	Survei dan Pengisian Kuesioner Tingkat Pengelolaan BMN												Skor 1,28	Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN
				Pelaksanaan Survei								Survei					

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
	5. Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal	92,62	Target tercapainya Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal adalah 92,62	Survei Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal												Nilai 92,62	Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi
			Rumus Hasil Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal dari ANRI	Pelaksanaan Survei Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal			Survei										
	6. Tingkat Pengawasan Arsip Internal	93,89	Target tercapainya Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal minimal 93,89	Survei Tingkat Pengawasan Arsip Internal												Nilai 93,89	Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi
			Rumus Hasil Tingkat Pengawasan Arsip Internal dari ANRI	Pelaksanaan Survei Tingkat Pengawasan Arsip Internal			Survei										
	7. Tingkat Digitalisasi Arsip	85,67	Target tercapai Tingkat Digitalisasi Arsip adalah 85,67	Survei Tingkat Digitalisasi Arsip												Nilai 85,67	Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi
			Rumus Hasil Tingkat Pengawasan Arsip Eksternal dari ANRI	Pelaksanaan Survei Tingkat Digitalisasi Arsip			Survei										

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Umum																
	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 99,95	Tingkat penggunaan produk dalam negeri diukur menggunakan 2 komponen yaitu Alokasi PDN dalam RUP dan Transaksi Belanja PDN : **Rumus Alokasi PDN dalam RUP** (Tagging PDN dalam RUP Penyedia)/(RUP Penyedia)x100% **Transaksi Belanja PDN** (Transaksi PDN Penyedia/Transaksi Penyedia)x100% **Tingkat Penggunaan PDN** (Alokasi PDN dalam RUP+Transaksi Belanja PDN/2)x100% Perhitungan tingkat penggunaan diambil dari	Hasil Nilai TPPDN atas pengadaan di MK dan Biro Umum													Nilai 99,95	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
			aplikasi LPSE-AMEL-Monitoring Atau Penilaian TKDN Dari Biro Renkeu														
	2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%	Hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Kemepan RB atas ASN MK minimal 100%	Hasil indeks ber AHKLAK												Nilai 100%	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
	3 Nilai Evaluasi SAKIP	A	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Umum oleh Inspektorat mencapai nilai minimal A	Hasil Evaluasi atas Lakip Biro Umum oleh Inspektorat												A	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
	4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Hasil penilaian manajeman resiko di Biro Umum oleh Inspektorat mencapai minimal 3	Hasil penilaian manajeman resiko di Biro Umum oleh Inspektorat												Nilai 3	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
	5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	92,89	Target tercapai jika Hasil WBK dari Menpan mendapatkan nilai minimal 92,89	Hasil Evaluasi dari Tim Penilai dari Menpan Tahapan: 1. Penyusunan Tim WBK 2. Pelaksanaan Survei dan pemenuhan Area WBK												92,89	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
	6 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	4	Target Tercapai jika penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat sesuai SOP	Penilaian dari Biro Renkeu												4	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
	7 Tingkat Penyerapan Anggaran	100 %	Target Tercapai jika penyerapan anggaran 99,10%	Hasil Penilaian dari Sivika												100%	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan
	8 Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja	Hasil Penilaian dari Sivika												80	Bagian Rumga, Arsip dan Ekspedisi, Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN, Bagian Pengamanan

Jakarta, 2 Januari 2026

Kepala Biro Umum

Budi Wijayanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniasih Panti Rahayu
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Kurniasih Panti Rahayu**

Digital Signature
mk-863359980260209015435

PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1. Tingkat Pengaruh Rekomendasi Kebijakan Strategis terhadap penguatan kelembagaan	76%
		2. Tingkat layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi	89,47
		3. Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,6
2.	Meningkatnya Kualitas Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100
		2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3. Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	89,67
		6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	5
		7. Tingkat Penyerapan Anggaran	100%
		8. Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Pengelolaan Kebijakan Strategis dan Literasi Konstitusi	Rp	922.306.000
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	400.000.000
Jumlah	**Rp**	**1.322.306.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Kurniasih Panti Rahayu

Digital Signature
mk969530547260209015541

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi – Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												Penanggung Jawab
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis, Perpustakaan, dan Literasi Konstitusi	1. Tingkat pengaruh rekomendasi kebijakan strategis terhadap Penguatan Kelembagaan	76%	Target tercapai jika rekomendasi kajian strategis yang diajukan dapat diimplementasikan oleh lembaga sebesar 76% **Rumus** Rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kajian rekomendasi yang disusun dikalikan 100% **Data dukung** 1. Laporan kajian 2. Lappran monitoring tindaklanjut rekomendasi / Laporan capaian kinerja secara periodik	**Tahapan kegiatan penyusunan kebijakan strategis**														Kabid P3
					1. Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang terkait dengan layanan kebijakan strategis Nota dinas, TOR, RAB, SK Tim	■	■	■										
					2. Melaksanakan kegiatan penyusunan kebijakan dan rekomendasi kebijakan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
					3. Melaksanakaan rapat pembahasan/FGD terkait dengan substansi kebijakan rekomendasi kepada pihak terkait	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					4. Menyusun laporan/naskah akademik/hasil telahaan kebijakan dan rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan kegiatan.						■	■	■	■	■	■	■
					5. Monitoring dan evaluasi berdasar hasil pelaksanaan kegiatan						■	■	■	■	■	■	■
					6. Melakukan survei terhadap layanan kebijakan strategis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

						7.	Evaluasi hasil survei atas layanan rekomendasi kebijakan strategis																	
		2.	Tingkat layanan Perpustakaan dan layanan literasi konstitusi	89,47	Target tercapai jika hasil survei menunjukkan skor 89,47 untuk pengukuran layanan Perpustakaan dan pemenuhan referensi literasi konstitusi. **Rumus** Capaian kinerja dihitung dari hasil survei dibagi dengan target indikator, dikalikan 100% **Data dukung:** Laporan hasil survei	**Layanan Perpustakaan dan Literasi Konstitusi**														- Kabid P2SK - Kabid P3
						1.	Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran dalam pengelolaan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi																	
						2.	Perencanaan survei pengukuran layanan Perpustakaan dan pemenuhan literasi konstitusi																	
						3.	Pelaksanaan kegiatan: 1. Pengelolaan koleksi perpustakaan 2. Penataan sarana/prasarana perpustakaan 3. Layanan perpustakaan (sirkulasi, pelabelan, dll) 4. Pengembangan DCL (sinkronisasi data InlisLITE, pengembangan kerjasama dengan Perpustakaan K/L lainnya) 5. Kegiatan pemenuhan kebutuhan referensi bagi internal dan eksternal 6. Kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi 7. Peluncuran buku 8. Promosi dan publikasi Perpustakaan 9. Layanan bimbingan penelitian 10. Pengelolaan dan penerbitan JK dan ConsRev 11. Penyusunan buku 12. Pengembangan kompetensi SDM Puslitka																	
						4.	Penyusunan Laporan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan																	
						5.	Pelaksanaan kegiatan survei																	

						6.	Monitoring dan evaluasi berdasar hasil survei																			
		3.	Tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi	84,6	Target tercapai jika hasil survei menunjukkan skor 84,6 untuk pengukuran layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi **Rumus** Capaian kinerja dihitung dari hasil survei dibagi dengan target indikator dikalikan 100% **Data dukung:** Laporan hasil survei	**Layanan Kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi**														- Kabid P2SK - Pustakawan
						1.	Penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang terkait dengan penguatan lembaga																		
						2.	Perencanaan survei pengukuran tingkat layanan kunjungan Pusat Sejarah Konstitusi (berupa konsep kuesioner, target responden, dan waktu pelaksanaan survei)																		
						3.	Pelaksanaan kegiatan 1. Kegiatan penerimaan kunjungan ke Pusat Sejarah Konstitusi 2. Kegiatan *maintenance* Pusat Sejarah Konstitusi																		
						4.	Penyusunan Laporan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan																		
						5.	Pelaksanaan kegiatan survei																		
						6.	Monitoring dan evaluasi berdasar hasil survei																		
2.	Meningkatnya Kualitas Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	Target tercapai jika penggunaan produk dalam negeri Puslitka mencapai angka 100 **Rumus** Hasil pengukuran dari Biro Renkeu tentang penggunaan produk dalam negeri di aplikasi SAKTI dibagi dengan target indikator dikali 100%	1.	Monitoring daftar kegiatan dan daftar pembelanjaan Puslitka tahun 2026																		- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Staf PPK
						2.	Monitoring pemilihan produk dalam negeri bagi setiap kegiatan																		
						3.	Monitoring penggunaan produk dalam negeri secara berkala																		
						4.	Evaluasi penggunaan produk dalam negeri secara berkala																		
		2.	Tingkat Implementasi	100%	Target tercapai jika hasil penilaian atas indeks core	1.	Monitoring kinerja pegawai di unit kerja Puslitka																		- Kasubbid TU - Staf PPK

			Core Value ASN BerAkhlak		value ASN BerAkhlak mencapai 100% **Rumus** Hasil penilaian indeks ASN BerAkhlak dari Biro SDMO dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	2.	Monitoring pelaksanaan implementasi core ASN BerAkhlak															
						3.	Penyiapan dokumen pendukung implementasi core ASN BerAkhlak															
						4.	Evaluasi hasil penilaiain indeks ASN BerAkhlak															
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A	Target tercapai jika nilai evaluasi SAKIP mencapai A **Rumus** Nilai evaluasi SAKIP Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Inspektorat dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	1.	Monitoring hasil evaluasi LAKIP Puslitka tahun 2025															- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Pustakawan - Pengelola Jurnal - Staf PPK
						2.	Finalisasi LAKIP Puslitka Tahun 2025															
						3.	Monitoring pengumpulan bukti dukung LAKIP Puslitka tahun 2026															
						4.	Pembentukan tim penyusun LAKIP Puslitka tahun 2026															
						5.	Kick-off penyusunan LAKIP Puslitka tahun 2026															
		4.	Tingkat kematangan Manajemen Risiko	3	Target tercapai jika nilai kematangan manajemen risiko mencapai 3 **Rumus** Nilai kematangan manajemen risiko yang diterbitkan oleh Inspektorat dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	1.	Evaluasi hasil tingkat kematangan manajemen risiko tahun 2025															- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Pustakawan
						2.	Penyusunan tim pengendali risiko di masing-masing bidang di unit kerja															
						3.	Monitoring pelaksanaan tahapan manajemen risiko di masing-masing bidang unit kerja															
						4.	Monitoring penyusunan laporan penyelanggaraan manajemen risiko di unit kerja															
						5.	Evaluasi hasil penilaian kematangan manajemen risiko di unit kerja tahun 2026															
		5.	Nilai Pembangunan	89,67	Target tercapai jika nilai pembangunan Zona	1.	Penyusunan tim pembangunan zona integritas per zona integritas															- Kabid P3 - Kabid P2SK

			Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)		Integritas mencapai 89,67 **Rumus** Nilai pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh TPI (Inspektorat) dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	2.	Monitoring penyusunan dokumen pembangunan zona integritas														- Kasubbid TU - Pustakawan
						3.	Finalisasi laporan pembangunan Zona Integritas																
						4.	Evaluasi dokumen Zona Integritas																
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	5	Target tercapai jika penilaian penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai SOP mencapai angka 5 **Rumus** Hasil penilaian dari Biro Perencanaan dan Keuangan atas pertanggungjawaban yang tepat waktu sesuai SOP pada aplikasi SIVIKA dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	1.	Penetapan anggaran Puslitka tahun 2026															- Staf PPK
						2.	Penyusunan program kegiatan dan kebutuhan anggaran selama tahun 2026																
						3.	Monitoring penggunaan anggaran Puslitka tahun 2026 secara berkala																
						4.	Monitoring pelaporan pertanggungjawaban keuangan agar tepat waktu dan sesuai SOP																
						5.	Evaluasi pertanggungjawaban keuangan																
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	100%	Target tercapai jika penyerapan anggaran mencapai 100% **Rumus** Hasil penyerapan anggaran unit kerja pada aplikasi SIVIKA setiap bulannya dibagi dengan target indikator dikalikan 100%	1.	Monitoring laporan pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran																- Staf PPK
						2.	Monitoring penyerapan anggaran selama tahun anggaran berjalan																
						3.	Monitoring laporan penyerapan anggaran																

						4.	Evaluasi penyerapan anggaran															
		8	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Target tercapai jika Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana mencapai nilai 80 **Rumus** Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja		Monitoring penyusunan Laporan Penyerapan Anggaran													- Kabid P3 - Kabid P2SK - Kasubbid TU - Staf PPK

Jakarta, 2 Januari 2026
Kepala Pusat Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Subekti
Jabatan : Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Nanang Subekti**

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.	Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	1.	Persentase *Judicial Administration System*	100%
		2.	Persentase *General Administration System*	100%
		3.	Tingkat Layanan Sistem Informasi	85,35
		4.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1
		5.	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	87,67
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi Komunikasi	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92,33
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	2
		6.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,99%
		7.	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	80

Kegiatan		Anggaran
1. Pengelolaan Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara	Rp 15.046.927.000	
Jumlah	**Rp**	**15.046.927.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Nanang Subekti

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk-116593600626020610375 6

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
1.	**Meningkatnya Kualitas Data, Teknologi dan Sistem Informasi Penanganan Perkara**																
	1. Persentase *Judicial Administration System*	100%	Target tercapai jika Persentase dukungan sistem informasi Judicial Administration System terpenuhi atau melewati target	Melaksanakan Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi pada JAS	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
				a Laporan pengembangan dan updating aplikasi SIMPP (PUU, SKLN, dan PHPU)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	BIdang Sistem Informasi dan Layanan Data, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
				b Laporan tersedianya perangkat, jaringan ruang RPH dan Sidang MKRI	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	BIdang Jaringan dan Infrastruktur, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
	2. Persentase *General Administration System*	100%	Target tercapai jika Persentase dukungan sistem informasi pada General Administration System terpenuhi atau melewati target	Melaksanakan Dukungan Sistem Informasi dan Teknologi pada GAS	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	
				a Laporan pengembangan dan updating aplikasi SIVIKA, SIGAPP, E-Kinerja, SIMPEG, dll	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	BIdang Sistem Informasi dan Layanan Data, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
				b Laporan tersedianya perangkat, jaringan pada semua unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	BIdang Jaringan dan Infrastruktur, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI
	3. Tingkat Layanan Sistem Informasi	Skor 85,35	Target tercapai jika tingkat layanan sistem informasi terpenuhi atau melewati target.	Pelaksanaan Layanan Sistem Teknologi dan Informasi												85,35	
					2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*		*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
			Nilai diperoleh dari survei internal.	a	Laporan layanan sistem informasi dan data	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	BIdang Sistem Informasi dan Layanan Data, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
				b	Laporan layanan infrastruktur dan jaringan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	BIdang Jaringan dan Infrastruktur, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
	4 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	3,1	Target tercapai jika tingkat implementasi kebijakan arrsitektur SPBE. Nilai diperoleh dari peniaian Komdigi.	Tersusunya dokumen pendukung implementasi kebijakan arsitektur SPBE													3,1	
									1 Dok	1 Dok	5 Dok	1 Dok						
				a	Laporan pemenuhan pada domain proses bisnis						1 Dok							BIdang Jaringan dan Infrastruktur, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
				b	Laporan pemenuhan pada domain layanan SPBE				1 Dok									Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
				c	Laporan pemenuhan pada domain data dan informasi					1 Dok								
				d	Laporan pemenuhan pada domain aplikasi SPBE						1 Dok							
				e	Laporan pemenuhan pada domain infrastruktur SPBE						1 Dok							Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
				f	Laporan pemenuhan pada domain keamanan SPBE							1 Dok						Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
				g	Laporan pemenuhan pada manajemen SPBE						1 Dok							Prakom Madya, Prakom

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
				h	Laporan pemenuhan pada tata kelola SPBE						1 Dok							Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
	5 Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	87,67	Target tercapai jika indeks SDI terpenuhi berdasarkan penilaian Bappenas	Penyusunan pemenuhan kelengkapan 3 domain dalam SDI													87,67	
								1 Dok		1 Dok	2 Dok	1 Dok		1 Dok	1 Dok			
				a	Laporan pemenuhan pada domain Kebijakan dan Kelembagaan						1 Dok							BIdang Jaringan dan Infrastruktur
				b	Laporan pemenuhan pada Domain Penyelenggaraan SDI			1 Dok		1 Dok		1 Dok		1 Dok				BIdang Sistem Informasi dan Layanan Data, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Statistisi
				c	Laporan pemenuhanpada Domain Data Leadership						1 Dok				1 Dok			
2.	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Teknologi Informasi Komunikasi**																	
	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	92,33	Target tercapai jika target penggunaan produk dalam negeri	Penyusunan laporan TKDN Bidang Sistem													92,33	

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
			terpenuhi. Nilai TKDN dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi SAKTI.	Informasi dan Layanan Data		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				a	Laporan penggunaan produk dalam negeri	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Bidang SI dan Layanan Data, Sub Bagian TU, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama, MI, Analisis TU, Staf PPK
	2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%	Target tercapai jika tingkat implementasi core value ASN BerAkhlak terpenuhi. Nilai core value ASN BerAkhlak dikeluarkan oleh SDMO.	Iimplementasi/ penerapan Core Value ASN BerAkhlak													100%	
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				a	Laporan Kegiatan Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Sub Bagian TU
	3. Nilai Evaluasi SAKIP	A	Target tercapai jika nilai evaluasi SAKIP terpenuhi. Nilai evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh Inspektorat.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja													A	
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	
				a	Laporan Capaian Kinerja unit kerja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Bidang Jaringan dan Infrastruktur,

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
				b Laporan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP												1 Dok	Bidang SI dan Layanan Data
	4 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	Target tercapai jika tingkat kematangan manajemen risiko terpenuhi. Nilai tingkat kematangan manajemen risiko dikeluarkan oleh Inspektorat.	Penyusunan laporan Penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring												3	
						3 Dok										1 Dok	
				a Surat Pernyataan Komitmen		1 Dok											Bidang Jaringan dan Infrastruktur, Bidang SI dan Layanan Data, Prakom Madya, Prakom Muda, Prakom Pertama
				b Profil Risiko		1 Dok											
				c Prioritas Risiko		1 Dok											
				d Laporan Manajemen Risiko												1 Dok	
	5 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	2	Target tercapai jika tingkat penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIVIKA	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan												2	
					1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				a Laporan Penyelesaian Pertanggujawaban Keuangan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Staf PPK
	6 Tingkat Penyerapan Anggaran	99,99%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi	Monitoring Anggaran Penyerapan Pustik												99,99%	

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)			(8)			(9)			(10)
			anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	Staf PPK
				a	Laporan Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
	7 Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana													80	
						1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				a	Laporan Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	

Jakarta, 2 Januari 2026
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Nanang Subekti

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Nanang Subekti - NIP:197411182006041002
Digital Signature
mk114367161226020610383 2
Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mundiri
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Mundiri**

PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1.	Meningkatnya pemahaman peserta pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	1.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,25
		2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,65
		3.	Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Skor 85,4
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 99,70
		2.	Tingkat Implementasi *Core Value* ASN BerAkhlak	100%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	94,5
		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	5
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,98%
		8.	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK	Rp	331.212.000
2. Penyelenggaraan Kerumahtanggan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	Rp	426.582.000
Jumlah	**Rp**	**757.794.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Mundiri

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk104055505226020603042 6

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
1	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK																
	a. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	Nilai 89,25	Indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dicapai Berdasarkan penjumlahan dari pembobotan 20% rata-rata nilai formatif dan 80% rata-rata nilai tes sumatif pemahaman peserta setelah mengikuti pendidikan pada kegiatan Bimbingan Teknis, PPHKWN, dan kegiatan pendidikan Pancasila dan Konstitusi													**89,25**	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan
				Penyusunan Dokumen Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran	1 Dok	6 Dok	2 Dok	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	6 Dok	
				1 Kurikulum Pendidikan		1 Dok											
				2 Silabus Pendidikan		1 Dok											

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
			lainnya Target tercapai jika minimum skor sesuai dengan yang direncanakan yaitu 89,25	3 Analis Kebutuhan Pendidikan		1 Dok											
				4 Kalender Pendidikan	1 Dok												
				5 Dokumen konsep pengembangan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan (E-Learning)		1 Dok										1 Dok	
				6 Dokumen Instrumen Pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran		1 Dok											
				7 Dokumen Evaluasi Kegiatan Pendidikan		1 Dok	2 Dok	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	5 Dok	
	b. Tingkat Kepuasaan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,65	Indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan diperoleh melalui survei peserta pendidikan melalui metode pengisian kuesioner.													3,65	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum
				Penyusunan Dokumen Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan													

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
			Nilai Indikator ini terdiri dari Tingkat Kepuasan Layanan Penyelenggaraan dan Tingkat Kepuasan Layanan Sarana Prasarana. Target tercapai jika minimum nilai sesuai dengan yang direncanakan yaitu 3,65	1 Dokumen Laporan Kegiatan Penyelenggaraan tiap kegiatan		1 Dok	2 Dok	1 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	4 Dok	3 Dok	4 Dok	4 Dok	5 Dok	
				2 Dokumen Survei dan Tindak Lanjut Survei Kepuasan Peserta Pembelajaran			1 Dok			1 Dok			1 Dok			1 Dok	
				3 Dokumen Laporan Statistik Sektoral												1 Dok	
	Tingkat Layanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi c.	Skor 85,4	Indikator ini merupakan Hasil dari Survei Internal Mahkamah Konstitusi. Target tercapai jika minimum skor sesuai dengan yang direncanakan yaitu 85.4													85,4	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum
				Pelaksanaan Layanan Pusat Pendidikan dan Konstitusi	6 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	7 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	14 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	7 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	16 Lap/ Dok	
				1 Dokumen Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	4 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	1 Lap/ Dok	6 Lap/ Dok	

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
				2 Dokumen Sarana dan Prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3 Lap	3 Lap	5 Lap	3 Lap	3 Lap	10 Lap	3 Lap	3 Lap	5 Lap	3 Lap	3 Lap	10 Lap	
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi																
	a. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	nilai 99,7	Nilai TKDN dikeluarkan oleh Biro Renkeu berdasarkan hasil monitoring masing-masing PPK/unit kerja setiap bulan pada aplikasi SAKTI. Target tercapai jika minimum nilai sesuai dengan yang direncanakan yaitu 99,7													99,7	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				1 Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
	b. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%	Nilai implementasi Core Value ASN berAkhlak dikeluarkan oleh Biro SDMO berdasarkan laporan dari masing-masing eselon 2 setiap bulan terkait dengan implementasi core values ASN Berakhlak di masing-masing unit kerja. Target tercapai jika minimum persentase sesuai dengan yang direncanakan yaitu 100%													100%	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum
				Implementasi/Penerapan Core Value ASN BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, AKuntabel, Kompoten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	2 Lap/ Dok	
				1 Laporan Kegiatan Implementasi Core Value ASN Berakhlak Pada Bidang Program dan Penyelenggaraan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
				2 Laporan Kegiatan Implementasi Core Value ASN Berakhlak Pada Bagian Umum	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	c. Nilai Evaluasi SAKIP	A	Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja								A						Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
			unit kerja. Nilai Evaluasi SAKIP dikeluarkan oleh inspektorat. Target tercapai jika nilai evaluasi sesuai dengan yang direncanakan yaitu nilai A	Pemantauan dokumen capaian kinerja Pusdik	2 Lap/ Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap/ Dok	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap/ Dok	
				1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				2 LAKIP Pusdik Tahun 2025	1 Dok												
				3 Dokumen Tanggapan Notisi atas Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi							1 Dok						
				4 Draft LAKIP Pusdik Tahun 2026												1 Dok	
	d. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai kematangan manajemen risiko unit kerja dikeluarkan oleh													3	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
			inspektrorat. Nilai tercapai jika tingkat kematangan manajemen resiko Pusdik mencapai level 3	Penyusunan dokumen penerapan Manajemen Risiko berupa identifikasi dan analisis risiko, evaluasi dan penanganan risiko serta monitoring			3 Dok									1 Lap	
				1 Surat Pernyataan Komitmen			1 Dok										
				2 Profil Risiko			1 Dok										
				3 Prioritas Risiko			1 Dok										
				4 Laporan Manajemen Risiko												1 Lap	
	e. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	Nilai 94,5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan								94,5						Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
			Melayani berdasarkan hasil penilaian dari TPI (Inspektorat) dengan kriteria Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 94.5	Pemenuhan dokumen pembangunan ZI Pusdik menuju WBBM			1 Dok			2 Dok						1 Dok	
				1 Rencana Aksi ZI			1 Dok										
				3 Laporan Monitoring Rencana Aksi ZI						1 Dok						1 Dok	
				4 LKE ZI						1 Dok							
	f. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	5	Hasil Penilaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP diperoleh melalui aplikasi SIVIKA													5	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan Pusdik	1 Lap	1 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	2 Lap	

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output		Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*		*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
				1	Laporan Penyelesaian Pertanggujawaban Keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				2	Laporan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan			1 Lap			1 Lap			1 Lap			1 Lap	
	g. Tingkat Penyerapan Anggaran	99,98%	Tingkat penyerapan anggaran adalah persentase realisasi anggaran belanja yang telah ditetapkan. Anggaran yang terserap dihitung berdasarkan nilai kinerja penyerapan anggaran selama satu tahun														99,98%	Kepala Bagian Umum Staf PPK
				Monitoring Penyerapan Anggaran Pusdik		1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				1	Laporan Penyerapan Anggaran Pusdik	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
	h. Tingkat deviasi rencana penarikan dana	80	Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah deviasi dari jumlah rencana penarikan dana														80	Kepala Bagian Umum Staf PPK

No	Sasaran Kegiatan (Output)	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*						*(8)*			*(9)*			*(10)*
			dalam kurun satu tahun	Deviasi Rencana Penarikan Dana	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	
				1 Laporan Rencana Penarikan Dana	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	

Jakarta, 2 Januari 2026
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Mundiri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sigit Purnomo
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan
Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Heru Setiawan	**Sigit Purnomo**

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	*(2)*	*(3)*		*(4)*
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko	1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,35
		2	Nilai Kapabilitas APIP	Level 3
		3	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	98,59
		4	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	84,04
		5	Indeks Manajemen Risiko	3,25
2	Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli	1	Indeks Survei Penilaian Integritas	78,50
		2	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,10
		3	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	85,79
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	5
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	100%
		8	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80

Kegiatan		Anggaran
1. Penyelenggaraan Pengawasan Intern	Rp	155.674.000
Jumlah	**Rp**	**155.674.000**

Jakarta, 2 Januari 2026

Atasan Pimpinan Unit Kerja,

Heru Setiawan

Pimpinan Unit Kerja,

Sigit Purnomo

PENJELASAN DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
1	**Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko**																	
	a	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,35	Target tercapai jika nilai maturitas SPIP yang diterbitkan oleh BPKP mencapai 3,35											3,35			Inspektur; Auditor
					Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi													Inspektur; Auditor
					Audit Tujuan Tertentu atas Pembayaran Horarium Dukungan Penanganan Perkara Sengkata Pemilihan Umum Kepada Daerah													Inspektur; Auditor
					Audit Kinerja atas Manajemen Kinerja PPPK pada Biro SDMO													Inspektur; Auditor
					Audit Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum													Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					TW I			TW II			TW III			TW IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				Audit Kinerja atas Layanan Pusdiklat MK pada Pusdik													Inspektur; Auditor
				Reviu Laporan Keuangan Unaudited TA. 2025													Inspektur; Auditor
				Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2026													Inspektur; Auditor
				Reviu Laporan Keuangan Triwulan III TA 2026													Inspektur; Auditor
				Reviu Pengadaan Barang dan Jasa TW I													Inspektur; Auditor
				Reviu Pengadaan Barang dan Jasa TW II													Inspektur; Auditor
				Reviu Pengadaan Barang dan Jasa TW III													Inspektur; Auditor
				Reviu Pengadaan Barang dan Jasa TW IV													Inspektur; Auditor
				Reviu Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2026													Inspektur; Auditor
				Reviu RKA K/L TA 2027 (Pagu Definitif dan Indikatif)													Inspektur; Auditor
				Reviu RK-BMN TA 2027													Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Reviu Pengelolaan PNBP TA 2025													Inspektur; Auditor
					Reviu Revisi Anggaran (Usulan Penambahan/ Pergeseran/ Penyesuaian)													Inspektur; Auditor
					Reviu P3DN													Inspektur; Auditor
					Reviu Laporan Kinerja Unit Kerja pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi													Inspektur; Auditor
	b	Level Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Target tercapai jika nilai Kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh BPKP mencapai Level 3													3	Inspektur; Auditor
					Pengembangan Kompetensi APIP													Inspektur; Kasubbag TU; Auditor
					Pelaksanaan Telaah Sejawat													Inspektur; Auditor
					Pembangunan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP													Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP													Inspektur; Auditor
					Monitoring TLHP APIP SMT I													Inspektur; Auditor
					Monitoring TLHP APIP SMT II													Inspektur; Auditor
	c	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	98,59	Target tercapai jika nilai persentase tindaklanjut yang diterbitkan oleh BPK mencapai 98,59									98,59					Inspektur; Auditor
					Monitoring TLHP Laporan Keuangan BPK - Smt I													Inspektur; Auditor
					Monitoring TLHP Laporan Keuangan BPK - Smt II													Inspektur; Auditor
					Monitoring LHA Kinerja BPK - Smt I													Inspektur; Auditor
					Monitoring LHA Kinerja BPK - Smt II													Inspektur; Auditor
	d	Tingkat Layanan Pengawasan Intern	84,04	Target tercapai jika nilai survey terkait tingkat layanan pengawasan intern yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan Keuangan mencapai 84,04 (skala 0-100)									84,04					Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja	Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
					Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
					TW I			TW II			TW III			TW IV			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
				Konsultasi dalam bentuk Kajian dan Telaah atas Usulan Kegiatan dan/ atau PBJ													Inspektur; Auditor
				Sosialisasi dan pendampingan penyusunan LHKPN Pelaporan 2025 berkerjasama dengan KPK													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan Obat-obatan Semester I Tahun 2026													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan Obat-obatan Semester II Tahun 2026													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan ATK Semester I Tahun 2026													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan ATK Semester II Tahun 2026													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan Solar (Semesteran)													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan Bahan Publikasi dan Jurnal Semester I Tahun 2026													Inspektur; Auditor
				SO Persediaan Bahan Publikasi dan Jurnal Semester II Tahun 2026													Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Pendampingan Stock Opname Persediaan Seminar Kit Pusdik (Semesteran)													Inspektur; Auditor
					Persediaan Cash Opname Bendahara Pengeluaran (Semesteran)													Inspektur; Auditor
	e	Indeks Manajemen Risiko	3,25	Target tercapai jika Indeks Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh BPKP mencapai 3,25 (skala 1-5)											3,25			Inspektur; Auditor
					Evaluasi Penilaian Mandiri Manajemen Risiko													Inspektur; Auditor
					Diseminasi Manajemen Risiko													Inspektur; Kasubbag TU
					Monitoring Evaluasi Manajemen Risiko													Inspektur; Auditor
2	**Terwujudnya Budaya Anti Korupsi dan Bebas Pungli**																	
	a	Indeks Survei Penilaian Integritas	78,50	Target tercapai jika Indeks Survei Penilaian Integritas yang diterbitkan oleh KPK mencapai 78,50 (skala 1-100)													78,50	Inspektur; Kasubbag TU
					Pendaftaran sebagai peserta SPI													Kasubbag TU

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Pengumpulan Data Responden													Kasubbag TU
					Monitoring Responden SPI													Kasubbag TU
					Diseminasi Konten													Kasubbag TU; Auditor
	b	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	3,10	Target tercapai jika Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang diterbitkan oleh BPKP mencapai 3,10 (skala 1-5)											3,10			Inspektur; Auditor
					Evaluasi Penilaian Mandiri Efektivitas Pengendalian Korupsi													Inspektur; Auditor
					Monitoring Kepatuhan atas Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2025													Inspektur; Auditor
					Monitoring Penanganan Pengaduan Masyarakat (Semesteran)													Inspektur; Auditor
					Monitoring Penanganan WBS (Semesteran)													Inspektur; Auditor
					Monitoring Penanganan													Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Gratifikasi (Triwulan)													
					Monitoring Penanganan Saber Pungli (Semesteran)													Inspektur; Auditor
					Monitoring Penanganan Konflik Kepentingan													Inspektur; Auditor
					Persentase Terlaksananya Penandatanganan Pakta Intergritas Tahun 2026													Kasubbag TU
	c	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	4	Target tercapai jika rating pada aplikasi SP4N Lapor mencapai 4 (skala 1-5)													4	Inspektur; Auditor
					Monitoring Penanganan SPAN-LAPOR (Triwulan)													Inspektur; Auditor
3	**Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat**																	
	a	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,98	Target tercapai jika nilai tingkat penggunaan produk dalam negeri pada aplikasi SAKTI minimal 99,98%													99,98	Inspektur; Kasubbag TU Auditor
					Monitoring SIVIKA terkait P3DN													Inspektur; Auditor

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
	b	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlak	100%	Target tercapai jika tingkat implementasi core value ASN BerAKHLAK paling rendah 100%													100%	Inspektur; Kasubbag TU
					Pelaksanaan kegiatan Coffee Morning, Olahraga Bersama													Inspektur; Kasubbag TU
	c	Nilai Evaluasi SAKIP	A	Target tercapai jika nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat paling rendah A														Inspektur; Kasubbag TU Auditor
					Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat T.A. 2025													Inspektur; Kasubbag TU
					Pendampingan dan Evaluasi SAKIP TA 2025 Inspektorat													Inspektur; Kasubbag TU Auditor
	d	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3	Target tercapai jika tingkat kematangan manajemen risiko pada Inspektorat paling rendah 3													3	Inspektur; Kasubbag TU Auditor
					Penandatanganan Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko													Inspektur; Kasubbag TU

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Updating Profil Risiko													Inspektur; Kasubbag TU Auditor
					Penentuan Risiko Prioritas													Inspektur; Kasubbag TU Auditor
					Laporan Implementasi Manajemen Risiko													Inspektur; Kasubbag TU Auditor
	e	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	85,79	Target tercapai jika nilai pembangunan zona integritas menuju WBK di Inspektorat paling rendah 85,79							85,79							Inspektur; Kasubbag TU Auditor
					Pendampingan dan Evaluasi Zona Integritas TA 2026 Inspektorat													Inspektur; Kasubbag TU Auditor
	f	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	5	Target tercapai jika tingkat penyelesaian pertanggungjawaban yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan minimal 5													5	Inspektur; Kasubbag TU

No.	Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja		Target	Penjelasan	Tahapan Kegiatan/Output	Rencana Aksi												Penanggung Jawab
						Jadwal dan Target Kegiatan (Triwulan)												
						TW I			TW II			TW III			TW IV			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(1)	*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*			*(7)*			*(8)*			*(9)*			*(10)*
					Laporan bulanan Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP													Kasubbag TU
	g	Tingkat Penyerapan Anggaran	100%	Target tercapai jika tingkat penyerapan anggaran di Inspektorat minimal 100%													100%	Inspektur; Kasubbag TU
					Laporan Realisasi Anggaran Bulanan													Kasubbag TU
	h	Tingkat Deviasi Rencana Penarikan Dana	Nilai 80	Tingkat deviasi rencana penarikan dana adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran yang ditetapkan dalam aplikasi SIVIKA dalam bulanan dengan realisasi penarikan dana oleh unit kerja													80	Inspektur; Kasubbag TU
					Laporan Realisasi Anggaran Bulanan													Kasubbag TU

Jakarta, 2 Januari 2026
Inspektur,
Sigit Purnomo

Inspektur
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002
Digital Signature
mk310017023260202034808

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177
Email: 0ffice@mkri.id